

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Arifin, dkk. (2015) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Di Dinas Pendapatan Kota Manado)”. Menerangkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu mendanai implementasi otonomi daerah, yang mampu mengatur dan mengelola rumah tangga sendiri dengan baik sebagai pendapatan dari pemerintah dalam bentuk subsidi atau bantuan. Sumber-sumber pajak daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan tata kelola dan pembangunan daerah. Keunggulan Kota Manado sebagai tempat pariwisata dan bisnis mampu dioptimalkan oleh bisnis pariwisatanya yang ditandai dengan jumlah hotel yang dibangun seperti hotel berbintang hingga hotel murah. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya Kota Manado sehingga dapat menunjukkan potensi pajak hotel yang menjadi sumber pendapatan daerah yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu data penerimaan pajak hotel Kota Manado tahun 2010 s/d 2014. Hasil penelitian berdasarkan target pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Pajak hotel di Kota Manado cukup memberikan kontribusi yang baik pada periode 2010 s/d 2014 yaitu sebesar Rp 66.946.272.913 yang artinya pajak hotel rata-rata menyumbang 7,58% per tahun untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pajak hotel di Kota Manado cukup berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian lain dilakukan oleh Destarika (2017) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta)”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain. Pajak Restoran dan Pajak Hotel adalah komponen pajak daerah. Restoran dan Hotel merupakan sektor potensial bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi, tingkat pertumbuhan dan efektivitas pajak restoran dan hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari Pemerintah Kota Surakarta yang diambil antara tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Surakarta serta data-data pendukung lainnya diambil dari berbagai instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran dan hotel di Surakarta memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Hal tersebut konsisten dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan kontribusi, efektivitas dan tingkat pertumbuhan pajak restoran dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 6,45% dan tingkat kontribusi pajak hotel adalah 6,17%. Perhitungan Laju Pertumbuhan pajak

restoran sebesar 19,27% pada tahun 2014 dan 12,39 pada tahun 2015, untuk pajak hotel sebesar 6,85% pada tahun 2014 dan -11,60% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan kontribusi pajak hotel pada tahun 2015 dan memerlukan upaya peningkatan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Febriya (2014) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)”. Pajak Hotel dan Restoran merupakan komponen sangat potensial dalam berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung mengingat jumlah hotel dan restoran di Kota Bandung yang terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh antara penerimaan Pajak Hotel serta Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara *parsial* dan *simultan* dari variabel penerimaan Pajak Hotel, penerimaan Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan studi kasus. Pengujian statistik menggunakan analisa regresi linier berganda, dimana pengaruh parsial dihitung dengan menggunakan uji t dan pengaruh simultan dihitung menggunakan uji F. Dan menggunakan analisa potensi Pajak Hotel serta potensi Pajak Restoran. Pada penelitian ini, penulis menentukan tingkat signifikansi 5%. Melalui uji t dua arah dihasilkan kesimpulan dimana secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan adanya pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara bersama terdapat pengaruh signifikan antara penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Hasil ini juga menarik kesimpulan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,6%. Sedangkan sisanya 75,4% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari penelitian ini. Berdasarkan potensi Pajak Hotel dan Restoran, pemerintah sudah kelenyapan penerimaan pajak sebesar 40% untuk Pajak Hotel dan 53,78% untuk Pajak Restoran.

Penelitian lain dimuat oleh Sahrudin (2017) dalam Jurnal Bisnis Terapan dan Ekonomi Vol. 3 No. 4 yang berjudul “Upaya Peningkatan Pajak Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bima”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan regresi linier sederhana. Analisis SWOT adalah untuk mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, dan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan dari masing-masing potensi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mendekati potensi rill. Dari hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08 %, Pajak Restoran 43,56 %, Pajak Reklame 53,37 %, dan Pajak Hiburan 53,16 % tergolong sangat efisien, dengan kriteria efisiensi kinerja keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 %

sangat efisien. Dari hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel adalah sebesar 4,23 %, Pajak Restoran 7,13 %, Pajak Reklame 18,08 %, Pajak Hiburan 4,45 %, tergolong tidak efektif, dengan kriteria efektifitas kinerja keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 % tidak efektif.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan”, (Siahaan, 2010)

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pendapatan asli Daerah.

a) Hasil pajak Daerah.

b) Hasil retribusi Daerah.

c) Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2) Dana perimbangan.

a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Dan Bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam.

b) Dana alokasi umum.

c) Dana alokasi khusus.

3) Pinjaman Daerah.

4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dalam bukunya mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013) ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri
- 2) Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2013) pajak dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu:

1) Berdasarkan golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang di akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Berdasarkan sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan atau bersandarkan pada subjeknya, yang artinya memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Berdasarkan pemungut dan pengelolanya

a) Pajak Pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berguna untuk mendanai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh masing-masing daerah.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan berguna untuk mendanai keperluan daerah.

Contoh:

- Pajak Daerah Tingkat I: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan juga air permukaan.
- Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

(Mardiasmo, 2016)

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun karakteristik sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besar atau kecilnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak muncul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

Contoh: *Official Assesment system* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak, dan Kendaraan Bermotor

2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyeter, serta melaporkan sendiri pajaknya. Berikut karakteristik *Self Assesment System* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

Contoh: Self Assesment System adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM).

3) *With Holding System*

With Holding System ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun karakteristik sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besar atau kecilnya pajak terutang pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan.

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Yakni negara berhak mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Yakni negara berhak membebankan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Yakni pembebanan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dibebankan pada seseorang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

f. Syarat Pemungutan Pajak

(Mardiasmo, 2016) Agar pemungutan pajak tidak menumbuhkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat di bawah ini:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni meraih keadilan, Undang-undang serta pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum juga merata, serta disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak untuk wajib pajak guna mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berlandaskan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini memberikan agunan hukum untuk menerangkan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih sedikit dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang tidak rumit akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- 1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

c. Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2:

1) Pajak Provinsi

(Prakosa, 2005) menyatakan bahwa pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.

Berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan,
- e) Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Bawah Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak

1) Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2) Subjek pajak daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah

3) Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

e. Jenis dan Tarif Pajak

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar:

1) Pajak provinsi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- e) Pajak Rokok 10%.

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel 10%;

- b) Pajak Restoran 10%;
- c) Pajak Hiburan 35%;
- d) Pajak Reklame 25%;
- e) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%;
- g) Pajak Parkir 30%;
- h) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- i) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

4. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009).

b. Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penopang sebagai kelengkapan

hotel yang sifatnya mempersembahkan kemudahan dan kenyamanan, termasuk prasarana olahraga dan hiburan, dan yang menjadi subyek pajak hotel adalah seorang individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada seorang individu atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah seorang individu atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu seorang individu atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kerangka pekerjaan atau perusahaannya melangsungkan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya wirausaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggungjawab seutuhnya untuk membayar pajak yang terutang. (Siahaan, 2009). Beberapa hal yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

(Perda Kota Batu, Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel)

c. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

(Siahaan, 2009) menerangkan bahwa dasar hukum pemungutan pajak hotel yakni antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu.
- 2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 pasal 6 menyebutkan bahwa. “Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak yang seharusnya dibayar kepada hotel (wajib pajak)”. Terdapat perlakuan yang berbeda apabila dasar pengenaan pajak atas transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa yaitu atas harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi



Keterangan:

PPH : Potensi Pajak Hotel

R : Jumlah Kamar

D : Jumlah hari

T : Tingkat hunian

Pr : Harga rata-rata kamar

2) Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Halim, 2004). Rumus untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$